

Komunikasi Pembangunan dan Media Massa: Suatu Telaah Historis, Paradigmatik dan Prospektif

Muhamad Fajar Pramono*

Dosen ISID/ Unida Gontor, Kepala LPPM UNIDA

E-mail:isidmfpramono@yahoo.co.id

Abstrak

Setiap bangsa mempunyai cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Selama akhir periode 1960-an definisi-definisi pembangunan terpusat di sekitar kriteria laju pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi dianggap sebagai jalur utama menuju pembangunan. Sekitar satu dasawarsa yang lalu terdapat optimisme yang berlebihan dan harapan yang besar mengenai peranan yang mungkin dimainkan oleh komunikasi massa dalam menunjang pembangunan di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Media massa, khususnya radio, masuk jauh ke tengah-tengah massa pendengar di negara-negara berkembang dan tampaknya merupakan suatu potensi yang besar dalam membantu negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Tujuan tulisan ini bermaksud untuk membahas Komunikasi Pembangunan dan Media Massa (tema kedua) dalam perspektif historis, paramadigmatik dan prospektif, dengan harapan: Pertama, mengetahui sejarah diskursus komunikasi pembangunan dan media massa. Kedua, memahami akar persoalan dan berbagai isu sentral terkait antara komunikasi pembangunan dan media massa. Ketiga, untuk mengetahui prospek komunikasi pembangunan dan media massa. Kini, media massa telah masuk lebih jauh dibandingkan dengan tahun 1965. Teknologi komunikasi yang baru, seperti, satelit-satelit siaran telah tampil dan berperan. Pejabat-pejabat pemerintah di kebanyakan negara-negara sedang berkembang sungguh-sungguh berusaha menggunakan komunikasi massa untuk keperluan pembangunan.

Kata Kunci: *Komunikasi Pembangunan, Media Massa, Paradigmatik*

* Kantor: Kampus Siman St. Km. 6 Ponorogo, Indonesia (63471). Alamat Rumah: Jl. Gabah Sinawur 30-D Cokromenggalan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63411. No. Kontak: +628123249764

Abstract

Every nation has its own way in carrying out development. During the period of the 1960s definitions centered around the development of criteria for economic growth. Industrialization is considered as the main path towards development. About one dasarwarsa ago there is excessive optimism and great expectations mengenai the possible role played by mass communications in supporting development in Latin America, Africa and Asia. The mass media, especially radio, to go deep into the middle of a mass audience in developing countries and appears to be a great potential in helping these countries to achieve development goals. This paper intends to discuss the Development of Communication and Mass Media (the second theme) in a historical perspective, paramadigmatik and prospective, with expectations: First, knowing the history of the discourse of development communication and mass media. Second, understand the root of the problem and the various central issues related to the development of communication and mass media. Third, to know the prospects of development of communication and mass media. Now, the mass media have been further in comparison to 1965. The new communication technologies, such as satellite-broadcast satellite has performed and play. Government officials in most developing countries earnestly trying to use mass communication for development purposes.

Keywords: *Development Communication , Mass Media , Paradigmatic*

Pendahuluan

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Everett M. Rogers (1989) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. *John Naisbitt* dalam bukunya *Megatrends* (1984) menyatakan ada sembilan kecenderungan besar yang sekarang sedang berlangsung di dunia. Salah satu kecenderungan besar itu adalah beralihnya masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dalam masyarakat industri, produksi dihasilkan oleh interaksi manusia dengan alam yang terolah, sedangkan masyarakat

informasi produksi merupakan hasil interaksi antara manusia dengan manusia.

John Naisbitt menyebutkan pula lima hal yang diperhatikan mengenai perubahan masyarakat industri ke masyarakat informasi. *Pertama*, masyarakat informasi merupakan suatu realitas ekonomi. *Kedua*, inovasi di bidang komunikasi dan teknologi komputer akan menambah langkah perubahan dalam penyebaran informasi dan percepatan arus informasi. *Ketiga*, teknologi informasi yang baru diterapkan dalam tugas industri yang lama, secara perlahan akan melahirkan kreativitas dan proses produksi yang baru. *Keempat*, dalam masyarakat informasi, individu yang menginginkan kemampuan menulis dan kemampuan dasar membaca lebih bagus dari masa lalu. *Kelima*, keberhasilan dan kegagalan teknologi komunikasi ditentukan oleh prinsip teknologi tinggi dan sentuhan yang tinggi pula.

Menurut *Alvin Tofler* dalam bukunya *The Third Wave*, perkembangan ini dinamai dengan gelombang ketiga (1980). Tofler membagi sejarah umat manusia menjadi tiga gelombang, yakni :

1. Gelombang pertama antara tahun 800 SM – 1700 M disebut juga gelombang pembaruan. Manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Tanah merupakan dasar bagi kegiatan ekonomi, kehidupan sosial budaya, struktursosial dan politik. Hubungan antar manusia sangat akrab, personal, dan komunikasi bersifat sederhana, tulisan sebagai alat bantu. Kemudian struktur ini diubah secara total oleh datangnya peradaban industri (gelombang kedua).
2. Gelombang kedua mulai berimpit dengan revolusi industri. Manusia beralih ke energi terbaru seperti minyak, batu bara, dan gas. Mulai ditemukan mesin uap yang kemudian dipadukan dengan pabrik yang menghasilkan barang-barang produksi. Industri bersandar pada kegiatan **produksi massal**. Hubungan manusia menjadi impersonal, komunikasi dikuasai oleh media massa. Gelombang ini akhirnya tergusur oleh gelombang ketiga.
3. Gelombang ketiga adalah peradaban yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan pengolahan data, penerbangan dan aplikasi angkasa luar, energi alternatif dan energi terbarukan serta rekayasa genetik dan bioteknologi, dengan komputer dan mikro teknik sebagai teknologi intinya. Pada era ini jaringan komunikasi, data dan informasi,

komputer, latihan dan teknologi modernlah yang terpenting. Informasi merupakan faktor penentu. Jika pada gelombang kedua mengutamakan kekuatan fisik manusia, pada gelombang ketiga menekankan pada kekuatan pikiran.

Perlu dicatat, bahwa tradisi studi komunikasi pembangunan, minimal sebagaimana dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diterapkan di pedesaan, memiliki sikap saling mendukung dengan sosiologi dan studi penyuluhan (Sajogyo, 1997). Tradisi demikian memberikan tugas lebih lanjut untuk memberikan alternatif studi komunikasi pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosiologis pedesaan Indonesia. Di Indonesia, minimal sampai akhir 1970-an, komunikasi pembangunan masih menggabungkan pendekatan media massa dan komunikasi interpersonal. Teori yang mendasarinya ialah komunikasi dua langkah (Hilbrink, 1976).

Pada masa itu radio menempati posisi penting. Isi siaran disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Sementara pada masyarakat tani dikembangkan kelompok media. Pada dekade 1980-an muncul pemahaman baru tentang kesalahan konseptualisasi teoritis (Melkote, 1991). Pemahaman ini masih dipengaruhi oleh pemikiran satu dekade sebelumnya. Semula dipandang bahwa komunikasi dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan tanpa melakukan hal lain. Pada saat ini muncul kesadaran bahwa ada masalah pembangunan yang memiliki kaitan sangat rendah dengan komunikasi, bahkan komunikasi meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ada tujuh tema pembicaraan yang menarik dalam teori-teori komunikasi pembangunan, yaitu: Pertama, *Communication Development, Interpersonal Communication, and Communication Psychology*. Kedua, *Communication Development and Mass Media*. Ketiga, *Communication Development and New Media*. Keempat, *Communication Development, Intercultural Communication, and Cross-Cultural Communication*. Kelima, *Communication Development and International Communication*. Keenam, *Current Issues in Communication Development*. Ketujuh, *Researches in Communication Development*.

Pada kesempatan yang terbatas penulis bermaksud untuk membahas komunikasi pembangunan dan media massa (tema kedua) dalam perspektif historis, paramadigmatik dan prospektif, dengan harapan: Pertama, mengetahui sejarah diskursus komunikasi pembangunan dan media massa. Kedua, memahami akar persoalan

dan berbagai isu sentral terkait antara komunikasi pembangunan dan media massa. Ketiga, untuk mengetahui prospek komunikasi pembangunan dan media massa.

Telaah Historis

Sekitar satu dasawarsa yang lalu terdapat optimisme yang berlebihan dan harapan yang besar mengenai peranan yang mungkin dimainkan oleh komunikasi massa dalam menunjang pembangunan di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Media massa, khususnya radio, masuk jauh ke tengah-tengah massa pendengar di negara-negara berkembang dan tampaknya merupakan suatu potensi yang besar dalam membantu negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Buku-buku berpengaruh dalam komunikasi dan pembangunan, seperti karangan Daniel Lerner *The Passing of Traditional Society* (1958) dan karangan Wilbur Schramm *Mass Media and National Development* (1964) dibaca oleh kalangan luas pada permulaan tahun enam-puluhan. (Everett M. Rogers, 1979).

Sedangkan media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media (Mardikato, 1997). Pembahasan tentang komunikasi pembangunan untuk desa-desa di Indonesia semakin mendesak untuk dilaksanakan. Pada satu sisi, aspek-aspek pembangunan telah mengalami perubahan sejak komunikasi pembangunan dikenal di Indonesia pada awal 1970-an, baik dalam organisasi strategi pembangunan maupun penggunaan media komunikasi. Pada saat ini strategi penanggulangan kemiskinan telah terorganisir dari tingkat internasional, nasional, sampai ke tataran kabupaten/kota. Telekomunikasi yang digunakan mencakup satelit dan internet, yang digabungkan dengan komunikasi interpersonal dari pendamping. Sayangnya, studi komunikasi pembangunan tertinggal dalam perumusan teori, konsep, dan analisis terhadap perjalanan pembangunan. Keteringgalan tersebut semakin dirasakan pada paradigma kritis dalam komunikasi pembangunan (Jansen, 2002; Wilkins, 2000).

Sebetulnya keteringgalan ilmu komunikasi pembangunan muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan konsep

pembangunan itu sendiri. Komunikasi massa telah lahir sejak usai Perang Dunia I, bahkan studi difusi telah muncul seabad sebelumnya (Melkote, 1991; Rogers, 1973). Manakala pembangunan dimulai sejak tahun 1940-an, sosiologi pembangunan baru muncul pada dekade 1950-an. Pada masa itu mulai tumbuh aliran modernisasi, yang menganggap hanya ada satu jalur bagi kemajuan negara dunia ketiga, yaitu dengan mereplikasi kemajuan negara maju. Akan tetapi baru satu dekade berikutnya muncul studi komunikasi pembangunan beraliran modernisasi, padahal yang digunakan ialah teori komunikasi massa dan difusi inovasi yang sudah ada sebelumnya.

Pembangunan dalam arti di atas sendiri baru dimulai di Indonesia sejak awal 1970-an. Bersamaan pada dekade tersebut dikenalkan studi komunikasi pembangunan, terutama beraliran modernisasi. Saat itu Indonesia sudah tertinggal satu dekade dari awal studi komunikasi pembangunan di dunia, dua dekade dari studi pembangunan, bahkan tertinggal sampai tiga dekade dari awal realitas pembangunan itu muncul.

Lebih mendalam lagi, sesungguhnya pada dekade 1960-an sudah muncul kritik terhadap teori modernisasi, dalam bentuk teori-teori keterbelakangan. Akan tetapi studi komunikasi pembangunan beraliran kritis baru muncul satu dekade berikutnya, pada tahun 1970-an. Pada dekade itulah Indonesia justru mengadopsi teori-teori studi komunikasi pembangunan yang lahir pada satu dekade sebelumnya, contohnya teori komunikasi dua langkah dan difusi inovasi. Dengan kata lain, studi komunikasi pembangunan di Indonesia tertinggal dua dekade dari studi pembangunan itu sendiri.

Ketertinggalan teoretis tersebut semakin mendalam pada saat ini. Realitas pembangunan dipandang mengalami perubahan kualitatif sejak 1980-an, terutama dalam bentuk globalisme, penguatan makna jaringan dan komunitas. Studi pembangunan pada umumnya mulai mengarah kepada perubahan realitas tersebut. Akan tetapi studi komunikasi pembangunan di Indonesia masih menggunakan teori yang serupa dengan masa 1970-an. Pada titik ini Indonesia sudah tertinggal hingga empat decade. Agak sulit membayangkan hubungan kesenjangan teori ini dengan praktek penelitian komunikasi pembangunan desa yang semakin banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sulit pula menghubungkan kesenjangan teretis ini kelangkaan buku-buku teori komunikasi pembangunan, karena penelitian yang sudah dilaksanakan seharusnya justru menjadi sumber penciptaan buku-buku teoritis

yang lebih sesuai dengan kondisi pembangunan desa di Indonesia.

Pembahasan di sini didasarkan pada hipotesis, bahwa kesenjangan teoritis komunikasi pembangunan desa di Indonesia berasal dari ketiadaan penelitian yang sistematis tentang pautan antara data-data empiris bersama dokumen pembangunan, dan proses penyusunan teori baru komunikasi pembangunan desa. Untuk membahas hipotesis tersebut, pada bagian berikutnya hendak ditunjukkan keluasan wilayah proyek dan program pembangunan yang seharusnya dianalisis oleh studi pembangunan desa.

Telaah Paradigmatik

1. Paradigma Lama

Di masa lampau, penelitian komunikasi sangat sedikit dikaitkan dengan berbagai aspek pembangunan. Kebanyakan penelitian itu mempermasalahkan difusi inovasi dalam bidang pertanian, kesehatan dan keluarga berencana. Akan tetapi, sedikit perhatian sekali perhatian yang telah diberikan pada bagaimana media massa dapat menunjang pencerahan massa untuk keperluan pembangunan, bagaimana khalayak dapat mengontrol lembaga-lembaga media melalui umpan balik, atau bagaimana media dalam mempersempit jurang pemisah antara mereka yang secara sosial dan ekonomi lebih beruntung dengan mereka yang sebaliknya (Mardikato, 1997).

Kampanye media komunikasi massa untuk pembangunan biasanya mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap bagian khalayak yang lebih beruntung (misalnya, yang bisa membaca, yang berpendapatan lebih tinggi dan yang lebih urban). Jadi kampanye semacam itu malahan memperbesar jurang pemisah pengaruh komunikasi antara khalayak yang beruntung dan tidak. Jurang pengaruh komunikasi ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika diambil langkah-langkah yang hati-hati, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Shingi, Mody dan rekan-rekannya, yaitu sebuah penelitian lapangan mengenei Televisi dan Keterbelakangan Pertanian di India (1972).

Secara singkat, paradigma lama mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, cara yang jelas bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai kemajuan dengan menjadikan dirinya seperti negara-negara maju. Paradigma dominan berusaha menjelaskan transisi dari masyarakat

tradisional menuju masyarakat modern. Pada tahun 1950-an, yang termasuk sistem tradisional adalah bangsa-bangsa di Amerika Latin, Afrika dan Asia (Suwarsono, 1991).

Dalam studi komunikasi, konteks memiliki arti khusus. *Pertama*, konteks sebagai pembentuk jenis-jenis studi khusus dalam komunikasi. Konteks media massa, misalnya, menghasilkan komunikasi massa. Konteks pembangunan tentu menghasilkan studi komunikasi pembangunan. *Kedua*, konteks merujuk kepada hal-hal yang lebih luas daripada proses komunikasi antara pemberi dan penerima pesan. Dalam pengertian ini, konteks mewujudkan ke dalam bentuk, misalnya, hubungan sosial, kelompok, organisasi, masyarakat dan budaya.

Ketika diperdalam satu per satu, terlihat bahwa pada saat ini komunikator dalam pembangunan desa tidak bisa didefinisikan semata-mata sebagai komunikator dalam makna mekanistik. Ragam komunikator pembangunan desa mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsultan (swasta), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perguruan tinggi, pemanfaat proyek, warga desa lain. Masing-masing pihak mungkin bersepakat tentang salah satu level pembangunan, sehingga dipandang berperan sebagai *stakeholders*. Akan tetapi tiap pihak dapat memiliki identitas sosial sendiri sehingga membentuk jaringan komunikasi yang berbeda, dibandingkan pihak-pihak lainnya.

Ragam pesan dalam pembangunan desa masa kini dapat berupa desentralisasi, efisiensi, sampai peran swasta dalam pendampingan. Pesan pembangunan akan dipraktekkan dalam bentuk benda material maupun interaksi sosial. Tidak mengherankan masing-masing pihak yang berkomunikasi di atas berupaya menyajikan pesan tertentu, bahkan berupaya menguatkan pesan produksi dirinya menjadi pesan yang dominan, atau kini biasa disebut di satu sisi sebagai *mainstreaming* dan di sisi lain dimaknai sebagai hegemoni.

Bahasan tentang media komunikasi tidak lagi mencukupi tentang efisiensi pilihan tipe untuk komunikator tertentu. Ragam media dalam program pembangunan desa kini mencakup internet, majalah, koran, radio, televisi, papan pengumuman, spanduk, dan leaflet. Pembahasan kini sudah mencakup kaitan kekuasaan, media, dan kekuasaan. Di samping aspek-aspek proses komunikasi di atas, konteks komunikasi juga telah dikembangkan meliputi percakapan (*conversation*), hubungan sosial (*relationship*), kelompok, organisasi,

masyarakat dan budaya. Percakapan tentang pesan-pesan pembangunan tidak berjalan dengan sendiri. Sebagai upaya untuk menyajikan perubahan masyarakat yang terencana, program pembangunan desa cenderung mematasi percakapan kepada pola-pola manajemen pembangunan. Percakapan hendak diarahkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol atau evaluasi proyek pembangunan.

Proses komunikasi dalam program pembangunan desa memiliki ciri hubungan sosial khusus. Pembahasan tentang hubungan sosial mampu menggali pola-pola kompetisi maupun koordinasi di antara komunikator. Jaringan di dalam hubungan sosial ini cenderung dipilih untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan. Penguatan makna *civil society* dan komunitas kini banyak diwujudkan dalam bentuk pembentukan kelompok. Ragam kelompok dalam program pembangunan desa mencakup kelompok orang miskin, kelompok elite/penilai, kelompok Pemda, kelompok pemerintah pusat, kelompok swasta/pendamping, kelompok LSM/wartawan. Adapun ragam organisasi untuk pembangunan desa juga mencakup birokrasi donor, birokrasi pemerintah pusat dan daerah, birokrasi swasta pusat dan daerah, birokrasi LSM dan wartawan pusat dan daerah. Akan tetapi bahasan dinamika kelompok dan organisasi yang terbatas pada homogenitas anggota atau stratifikasi tidak lagi mencukupi. Alur kekuasaan turut mempengaruhi pola komunikasi yang terbangun.

Lebih lanjut, dalam program juga mulai dipertimbangkan konsekuensinya yang tidak direncanakan terhadap masyarakat dan budaya. Pola hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat turut dipengaruhi oleh kebiasaan manajemen pembangunan berbasis proyek. Di tengah masyarakat desa juga tumbuh makna baru tentang penurunan peran pemerintah sebagai agen kekuasaan, sebaliknya penambahan peran swasta (konsultan) sebagai pendamping. Makna ini menyulitkan pembedaan peran dari LSM (lembaga swadaya masyarakat).

2. Paradigma Baru dan Alternatif

Berbicara potret paradigma komunikasi dalam pembangunan dewasa ini, tentunya tidak akan lepas dari paradigma dominasi pembangunan, yang pemikirannya didasarkan pada teori modernisasi, teori ketergantungan dan teori sistem dunia. Namun, kenyataannya teori-teori tersebut dianggap gagal dalam meningkatkan paartisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, paradigma pembangunan diformulasikan dengan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), pusat pinggiran atau dari negara maju ke negara miskin yang cenderung satu arah (linier). Asumsinya, dengan kemajuan teknologi, pembangunan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, dengan mendorong arus vertikal, dan menekankan pembangunan ekonomi.

Pada tingkat ini, pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang memiliki otoritas, kekuasaan dan dukungan finansial. Kondisi ini membawa konsekuensi pada munculnya ketergantungan kepada sumber-sumber resmi (pemerintah/negara). Selain itu, model baru ini juga menciptakan pola ketergantungan baru, dengan membuat lembaga-lembaga dunia, seperti: *World Bank*, IMF, WTO, serta menunjukkan *Trans National Corporations* (TNC). Hal inilah yang sekarang sedang berlangsung di sekitar kita (Dunia Ketiga). Dalam banyak referensi, situasi ini seiring disebut globalisasi atau Neo-Liberlisme. Model pembangunan yang ada terpola sesuai keinginan sumber resmi, tidak menyediakan ruang diskusi kepada masyarakat atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Masyarakat tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan kehidupannya. Akibatnya, masyarakatnya semakin termarginalkan dalam kehidupan dan pergaulan sosialnya.

Dengan demikian, pengaruh model paradigma dominan pembangunan bermuara pada penggunaan model satu arah (linier) yang bersifat mekanistik. Barnett Pearce (1986) misalnya mengaitkan paradigma-paradigma pembangunan dalam meletakkan komunikasi di dalamnya. Secara langsung atau tidak, pendekatan komunikasi dalam usaha perubahan sosial akhirnya menganut model komunikasi satu arah (linier) dan menganut struktur hierarki. Dalam model komunikasi satu arah (linier), media massa dianggap memainkan peranan penting dalam pendekatan pembangunan, khususnya dalam penyampaian pesan yang persuasif dan informatif dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi massa dianggap akan menjadi kekuatan ampuh dalam pembangunan. Para ahli komunikasi saat itu mengakui pendekatan media massa sebagai sarana menciptakan iklim kondusif bagi terlaksananya pembangunan, dengan indikator penyebaran pesan pembangunan.

Hal lain yang berkaitan dengan pendekatan komunikasi dalam pembangunan adalah pengaruh perspektif dramaturgis yang

cenderung manipulatif. Perspektif ini memandang dunia kehidupan sosial ibarat pentas drama yang penuh peran, adegan, agen, dan tujuan yang manipulatif. Setiap peran yang dimainkan bukan menunjukkan identitas yang sebenarnya. Realitas sosial dipahami dalam dua sisi, panggung depan dan belakang yang sulit ditebak. Dari sini para agen pembangunan memanipulasi fakta dan data lewat saluran media massa untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, seringkali pemerintah sebagai agen pembangunan tidak memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Peran yang dilakoni justru membawa misi tertentu dalam mempertahankan kepentingan, posisi, dan citranya secara politis.

Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi media massa mengalami distorsi kepentingan antara nilai-nilai idealis dan nilai-nilai faktual, serta antara informasi yang layak dan informasi khayali (imajiner). Pada batas ini, media massa memunculkan persoalan baru yang lebih merepresentasikan budaya massa yang merupakan hasil produksi negara maju, ketimbang aspek pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk kepentingan yang lebih besar, komunikasi dipandang paling tidak menurut komunikator (pemerintah) sebagai instrumen kunci bagi suksesnya usaha pembangunan. Dan sejak itulah segala daya dan kemampuan komunikasi mulai dipandang untuk dimanfaatkan sebagai saluran penyampaian informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Berbagai pengalaman komunikasi pembangunan yang berlangsung menimbulkan kesenjangan efek komunikasi. Salah satu hal yang dikritik kalangan peneliti adalah gejala di kalangan komunikator yang lebih mementingkan unsur tertentu dari sekian komponen komunikasi yang ada.

Berdasarkan kenyataan ini, posisi komunikasi dalam pembangunan menjadi kehilangan peran, bersifat satu arah sehingga memicu munculnya jurang pemisah (gap) antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dalam hal ini dipandang tidak lebih sebagai penerus informasi, yang bersifat mekanistik tanpa memikirkan karakteristik masyarakatnya. Suatu bukti yang tidak terbantahkan akibat dari perspektif tersebut, yaitu masyarakat yang mengalami keterbelakangan dalam pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi difusi-inovasi model komunikasi linier pada masa itu berorientasi pada peran sumber-sumber resmi sebagai penyedia atau pencipta

inovasi yang disalurkan melalui media massa, sementara khalayak di daerah-daerah diposisikan sebagai penerima dan penyerap inovasi.

Pada batas ini, inovasi yang diusung media massa menjadi ajang eksploitasi dan mobilisasi dukungan dari proses komunikasi sehingga inisiatif lokal dari masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroots*) tidak mendapat cukup peluang untuk mengekspresikan gagasan dan kepentingannya secara bebas. Yang terjadi kemudian ide gagasan pembangunan didefinisikan sebagai upaya mendukung kepentingan yang berpihak *status quo*. Jika demikian, pertanyaan yang patut diajukan pada konteks ini, adalah siapa yang bisa mengontrol media massa sebagai alat dalam komunikasi pembangunan? Inilah posisi sulit dalam pendekatan media massa dalam komunikasi pembangunan.

Pada perkembangan kemudian dikenal dengan pendekatan komunikasi partisipatoris. Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan yang melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi (sumber-penerima) memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran. Pendekatan partisipatif berlandaskan semangat kebersamaan (*togetherness, communality*) dalam mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan, termasuk cara-cara memecahkan masalah bersama. Konsepsi kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempertukarkan dan merundingkan makna pesan (*exchange and negotiation of meaning*) menuju keselarasan dan keserasian makna bersama.

Dalam pendekatan partisipatoris, semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama sehingga cara menyelesaikannya pun perlu dipikirkan bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang publik (*public sphere*) maka memungkinkan setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata. Selain itu, pendekatan partisipatoris memfokuskan pada penggalian dan pemanfaatan potensi media lokal (*indigenous media*) sebagai alternatif penggunaan media komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat.

Dengan demikian, pendekatan partisipatoris sebagai strategi komunikasi pembangunan mengutamakan arus komunikasi yang berlangsung dua arah sebagai ciri komunikasi sosial dengan penggabungan model analisis isi media dan model yang berorientasi kepada khalayak. Proses ini memberi peran dan tanggung jawab

bersama kepada semua pihak yang terlibat komunikasi dalam pendistribusian informasi secara merata dalam praktik komunikasi pembangunan. Dengan sendirinya, cara-cara yang berlaku pada model linier dianggap tidak relevan lagi dalam pendekatan ini. Sehingga proses pembangunan pada pendekatan ini bukan lagi proses produksi barang dan jasa di lapangan industri menurut teori modernisasi, melainkan usaha strategi pembangunan.

Akhirnya, dengan pergeseran paradigma komunikasi dalam pembangunan, membuka jalan bagi pengembangan model komunikasi yang relevan dalam pembangunan. Berdasarkan model pendekatan partisipatoris, usaha pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan inisiatif dan kreativitas, dan swadaya individu dan kelembagaan dalam masyarakat seperti yang diungkapkan Korten dan Carner (1993) dapat diwujudkan. Demikian pula konsep-konsep pembangunan masyarakat di bawah paradigma dominan pembangunan, seperti: model komunikasi atas bawah (linier), *community development*, *development reporting*, *support of communication development*, dan lain-lain, perlu dipikirkan ulang (*rethinking*) konsep penggunaannya di masyarakat. Apalagi hal tersebut didasari oleh berbagai fakta di lapangan tentang kegagalan konsep paradigma dominan pembangunan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Kini berbagai istilah muncul di masyarakat, seperti: *capacity bulding*, *civil of journalism*, jurnalisme hati nurani (jurnalisme damai), termasuk model komunikasi konvergen, merupakan konsep yang relevan dengan pendekatan partisipatoris.

Banyak pihak percaya bahwa kegagalan pendekatan komunikasi dalam praktik pembangunan disebabkan belum maksimalnya pendekatan komunikasi yang sesuai dengan konsep pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan partisipatoris memiliki peran penting dalam pengembangan kapasitas individu, kelompok atau komunitas dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini potensi aset-aset lokal dan keanekaragaman sosial budaya dapat dimanfaatkan bagi pencapaian kemandirian, lepas dari ketergantungan sebagai tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Namun yang perlu dicatat, penerapan pendekatan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kompleksitas sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat ikut berpengaruh dalam pendekatan ini. Suatu cara yang bijaksana, penerapan pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat.

Penutup dan Prospek

Pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, sejumlah peristiwa internasional bertemu dengan kritik intelektual sebagaimana dikemukakan di atas dan mulai mengguncangkan kredibilitas paradigma pembangunan yang dominan sebelumnya, antara lain, terkait dengan pencemaran lingkungan, krisis minyak dunia, dibukanya hubungan internasional dengan RRC dan peristiwa lainnya. Dari kenyataan-kenyataan seperti di atas maka munculan suatu kesimpulan bahwa ternyata masih banyak terdapat jalan alternatif menuju pembangunan (Suwarsono, 1991).

Pada pertengahan 1970-an bisa dikatakan bahwa paradigma lama telah "usai" dan mulai munculnya alternatif-alternatif pembangunan. Pembangunan tidak lagi berfokus pada pertumbuhan ekonomi, teknologi padat modal, perencanaan yang terpusat dan adanya suatu pemikiran bahwa penyebab utama keterbelakangan berasal dari dalam. Kini paradigma pembangunan mulai bergeser, yaitu fokus pada pemerataan, kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Munculnya alternatif-alternatif terhadap paradigma lama tentang pembangunan menyiratkan peranan komunikasi dalam komunikasi juga harus dirubah. Periode ini ditandai oleh optimisme besar akan sumbangan potensial komunikasi terhadap pembangunan, sesuatu yang konsisten dengan pendapat umum tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mempercepat pembangunan. Tentu saja, selama tahun-tahun 1950-an dan 1960-an terjadi perkembangan dalam media.

Kemampuan baca-tulis yang semakin meluas di negara-negara berkembang, menyebabkan bertambah banyaknya pembacaan terhadap media cetak. Radio-radio transistor mulai menembus daerah pedesaan, termasuk Serangkaian penelitian komunikasi dilancarkan diberbagai negara berkembang, seperti di Columbia, Turki dan daerah lain sebagai pembenar dari tesis di atas (Rogers, 1976). Intinya, bahwa kecenderungan yang ada dalam konsepsi pembangunan komunikasi yang baru: pembangunan diri (*self-development*), kesenjangan akibat komunikasi dan teknologi komunikasi yang baru. Sedangkan implikasinya terhadap penelitian dan kegiatan komunikasi. Para sarjana komunikasi mulai menyadari akan kemungkinan pemihakan mereka kepada para sponsor (baca: pemerintah). Salah satu cara yang mereka lakukan adalah membuat rancangan penelitian dengan anggaran yang sangat rendah untuk

menjaga indenpensi dari sponsor. Implikasinya, perlunya penelitian lapangan dalam studi komunikasi.

Akhirnya disadari bahwa peranan komunikasi massa dalam merangsang pembangunan seringkali tidak langsung dan hanya bersifat membantu, ketimbang langsung dan menentukan. Tetapi hal ini bervariasi menurut berbagai segi, seperti, media, pesan, khalayak serta sifat pengaruh yang diharapkan (Rogers, 1976).

Kini, tahun 1976, kita melihat kembali ke belakang. Benarkah media massa telah masuk lebih jauh dibandingkan dengan tahun 1965. Teknologi komunikasi yang baru, seperti, satelit-satelit siaran telah tampil dan berperan. Pejabat-pejabat pemerintah di kebanyakan negara-negara sedang berkembang sungguh-sungguh berusaha menggunakan komunikasi massa untuk keperluan pembangunan. Namun, hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai. Penampilan yang mengecewakan dari paradigma yang dominan selama dasawarsa yang lalu membawa kita untuk mempertimbangkan berbagai konsepsi alternatif mengenai komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi pembangunan haruslah dilihat sebagai suatu proses menyeluruh, termasuk pemahaman terhadap khalayak serta kebutuhan-kebutuhannya, perencanaan komunikasi disekitar strategi-strategi yang terpilih, pembuatan pesan-pesan, penyebaran, penerimaan, umpan balik terhadap pesan-pesan itu dan bukan hanya kegiatan langsung satu arah dari komunikator kepada penerima yang pasif.

Konseptualisasi daripada komunikasi dalam pembangunan ini mengandung pertanyaan terhadap "pendekatan komponen" dalam penelitian komunikasi. Pendekatan komponen pada hakekatnya bersifat atomistis dan mekanistis dengan memilah-milah demi tujuan ilmiah unsur-unsur dalam peristiwa komunikasi dengan maksud tujuan untuk memperoleh pengertian tentang bagaimana komponen-komponen atau unsur-unsur itu bekerja. Pendekatan ini menunjukkan hakekat proses komunikasi sebagai suatu sistem terhadap komunikasi pembangunan.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana. Jakarta
- Dilla, S. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Simbiosis. Bandung.

- Fisher, B. Aubrey. (1986). *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Griffin, EM. (2003). *A First Look at Communication Theory*, 5th Edition. USA: McGraw-Hill
- Korten, D.C., (1984), *People Centered Development* ; West Harford: Kumarian Press.
- Litlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. (2008). *Theories of Human Communication*. Belmont, USA: Pre-Press Company, Inc, Ninth Edition.
- Mardikanto, Totok. (1997). *Dasar-dasar Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I.
- Miller, Katherine. (2002). *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts*. USA: McGraw Hill
- Naisbitt, John. (1984), "*Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives*," Warner Books.
- Rogers, E. M (Ed). 1989, *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. Jakarta: LP3S.
- Rogers, E. M. 2003, *Diffusion of Innovations: Fifth Edition*. Free Press. New York.
- Sajogyo, ed. (1997). *Menciptakan Visi: Mendukung Pengembangan Kelompok Swadaya Mandiri dalam Gerakan Nasional PPK*. Puspa Swara. Jakarta
- Suwarsono, Alvin Y.So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, Cet. I.
- Tofler, Alvin (1980). *The Future Shok "Third Wave"*.New York: Bantam Book.